

STRATEGI PENINGKATAN IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI DI PROPINSI SULAWESI UTARA

Pingkan Pratasis

ABSTRAK

Penerapan SMK3 oleh perusahaan jasa konstruksi di Propinsi Sulawesi Utara memiliki banyak masalah yang diidentifikasi sebagai faktor-faktor penghambat. Studi ini bertujuan mengetahui faktor-faktor penghambat yang berpengaruh terhadap penerapan K3 pada perusahaan jasa konstruksi di Propinsi Sulawesi Utara dan bagaimana alternatif kebijakan publik yang dapat diusulkan. Hasil analisis korelasi product moment diperoleh bahwa keseluruhan faktor tersebut berpengaruh, dimana faktor yang paling berpengaruh adalah perencanaan anggaran proyek. Usulan Kebijakan publik dalam penerapan K3 adalah: anggaran pengadaan peralatan dan bahan K3 perlu dimasukkan dalam RAB setiap pekerjaan konstruksi; mekanisme pengawasan perlu untuk diatur agar tercipta kesadaran untuk mengimplementasi K3 dilapangan, termasuk pengaturan kewenangan untuk bidang K3 pada dinas terkait. Demikian pula aturan reward dan punishment untuk menggalakkan kepedulian implementasi K3, juga sosialisasi K3 perlu dilaksanakan secara berkala, dengan berbagai bentuk dan metode serta pengarahan langsung di lapangan, serta pembentukan unit pengelola alat dan bahan K3.

Kata kunci : K3, konstruksi, implementasi, penghambat

1. PENDAHULUAN

Keselamatan kerja merupakan suatu permasalahan yang menyita perhatian berbagai organisasi pekerja dan buruh, karena mencakup permasalahan segi perikemanusiaan, biaya dan manfaat ekonomi. Proyek konstruksi pada umumnya merupakan kegiatan yang mengandung banyak 34ndust bahaya. Hal tersebut menyebabkan 34ndustry konstruksi mempunyai catatan buruk dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Ervianto, 2002 menambahkan karena situasi dalam lokasi proyek konstruksi mencerminkan karakter yang 'keras' dan kegiatannya terlihat sangat kompleks dan sulit dilaksanakan, sehingga dibutuhkan stamina yang prima dari pekerja yang melaksanakannya. Ditambah lagi pekerjaan di bidang ini memunculkan resiko gangguan kesehatan apalagi pekerjaan yang dilakukan pada daerah yang terbuka.

Di Indonesia kasus kecelakaan kerja pada proyek konstruksi menempati urutan tertinggi, yaitu sekitar 32% dari semua kecelakaan yang terjadi (Fitriana, 2010). Dengan melihat besarnya tingkat kecelakaan kerja di dunia industri konstruksi tersebut, maka permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja, lebih dikenal dengan nama (K3) perlu mendapat perhatian yang serius, karena jika diabaikan akan sangat berpengaruh pada kinerja suatu proyek.

Dalam rangka mengantisipasi dan meminimalkan dampak dari kecelakaan kerja tersebut, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa perundangan dan peraturan turunannya, di antaranya Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Instruksi Menteri Tenaga Kerja RI No. INST 05/M/RW/96 tanggal 28-10-1996 tentang Pengawasan dan Pembinaan Keselamatan Kerja Pada Kegiatan Konstruksi Bangunan, Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum No. 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. KEP. 174/MEN/1986, No. 104/KPTS/1986, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi.

Sekalipun peraturan perundang-undangan terkait keselamatan dan keamanan kerja telah banyak dikeluarkan, namun jumlah kecelakaan masih tinggi. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya perusahaan di bidang jasa konstruksi yang belum melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut, terlebih untuk menerapkan K3 pada setiap pekerjaan jasa konstruksi yang dilakukannya. Konsekuensinya, bahwa dampak dari belum atau kurangnya penerapan K3 oleh perusahaan jasa konstruksi berakibat fatal hanya pada satu unsur pekerjaan, yaitu para pekerja lapangan atau biasa disebut buruh bangunan.

Dari beberapa literatur, ditemukan bahwa ketiadaan atau kurangnya perusahaan jasa konstruksi dalam penerapan K3 oleh karena berbagai faktor, baik faktor pemerintah, perusahaan jasa konstruksi, maupun dari para pekerjanya. Cheah (2007) mengidentifikasi bahwa faktor pertama yang mempengaruhi standar K3 adalah faktor pekerja yang melaksanakan pekerjaan fisik, kemudian diikuti faktor kontraktor dan pemerintah sebagai pengatur kebijakan mengenai K3, faktor pengembang dan secara tidak langsung adalah faktor peranan konsultan. Razuri, et. Al. (2007) menunjukkan bahwa kinerja keselamatan dipengaruhi oleh variabel orientasi dan pelatihan khusus keselamatan untuk tingkat manajemen, variabel perencanaan proyek dan praktek partisipatif.

Selanjutnya, Sudjana (2006) mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan-perusahaan baik kecil

dan menengah di Propinsi Bali sebagai berikut: 1) Hasil yang dicapai dari penerapan K3 dan ergonomi baru dalam bentuk terciptanya tempat kerja yang sehat, aman, nyaman dan efisien, dan peningkatan produktivitas kerja, namun belum mampu menunjukkan keuntungan dalam bentuk uang, 2) Manajemen perusahaan masih memberikan prioritas rendah pada program ergonomi dan K3, 3) Program yang dilaksanakan lebih banyak program kuratif dibandingkan dengan program preventif dan promotif sehingga tampak sebagai pengeluaran saja, 4) Kurangnya pengetahuan manajemen dan karyawan mengenai ergonomi dan K3, 5) terbatasnya dana, dan 6) lemahnya pengawasan dan penerapan sanksi oleh pemerintah.

Demikian pula, Rifandy (2010) mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan K3 pada industri pertambangan adalah sebagai berikut: 1) keterbatasan dana, 2) rendahnya budaya dan disiplin, dan 3) rendahnya pengetahuan mengenai K3. Selain itu, Adawiah (2010) yang khusus meneliti mengenai tenaga kerja perempuan mengungkapkan bahwa faktor-faktor penghambat dalam penerapan K3 juga disebabkan antara lain: 1) alokasi dana untuk pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja sangat terbatas, 2) terbatasnya tenaga pengawas di perusahaan, dan 3) tidak adanya sanksi dari perusahaan terhadap tenaga kerja perempuan yang tidak mentaati penggunaan alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja. Faktor lainnya seperti yang diungkapkan oleh Bashir (2008) meliputi situasi dan kondisi di tapak proyek, kurangnya kemahiran penggunaan peralatan dan penggunaan peralatan keselamatan yang tidak baik sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan bahkan menyebabkan kematian.

Dari berbagai faktor yang diungkapkan sebelumnya, kami mengidentifikasi faktor-faktor penghambat penting dalam penerapan K3 pada perusahaan jasa konstruksi, sebagai berikut: 1) perencanaan anggaran proyek, 2) frekuensi sosialisasi K3 dari pemerintah, 3) pengawasan dan sanksi, 4) ketersediaan peralatan K3, 5) budaya pekerja di lapangan, 6) perencanaan strategis dan prioritas perusahaan, dan 7) tingkat kerumitan desain bangunan dan tapak proyek.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tulisan ini dilakukan untuk melihat seberapa signifikan pengaruh faktor-faktor penghambat penting yang diidentifikasi terhadap implementasi K3 pada perusahaan jasa konstruksi dengan kualifikasi besar yang terdaftar pada organisasi Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi) Daerah Sulawesi Utara. Selanjutnya faktor-faktor ini akan dianalisis dan diinterpretasikan untuk membahas strategi peningkatan implementasi K3 pada perusahaan jasa konstruksi di Propinsi Sulawesi Utara, yang merupakan tujuan penulisan ini.

2. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Kajian akan implementasi K3 sektor 35iteratu konstruksi telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar kajian tersebut membahas dan melaporkan implementasi K3 oleh pemerintah dari sisi kebijakan umum dan oleh perusahaan dari sisi pekerja dan manajemennya. Studi pada implementasi K3 dalam 35iteratu konstruksi dengan mengkaji peningkatan implementasi K3 melalui penguatan organisasi perusahaan jasa konstruksi dan aksi kebijakan dari pemerintah sangat langka dalam 35iterature teknis. Penulis percaya bahwa studi yang berhubungan dengan pemecahan masalah untuk peningkatan implementasi K3 melalui penguatan organisasi secara bersama dengan aksi kebijakan pemerintah dilakukan untuk pertama kalinya dan akan sangat bermanfaat untuk manajemen konstruksi dan proyek.

3. METODE PENELITIAN

Dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka rancangan penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan rancangan (*design*) penelitian *explanatory* (penjelasan). Hipotesis yang hendak dibuktikan dalam penelitian *explanatory* ini adalah terdapat pengaruh faktor-faktor penghambat penting dalam penerapan K3 pada perusahaan jasa konstruksi di Propinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya, hipotesis dimaksud akan diuji untuk mengetahui hubungan antar variabel.

1. Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan jasa konstruksi yang beroperasi di Provinsi Sulawesi Utara dengan kualifikasi Besar (grade 5, 6 dan 7) yang terdaftar pada organisasi GAPENSI Propinsi Sulawesi Utara tahun 2010. Pemilihan populasi tersebut dengan asumsi bahwa yang berhak menerapkan K3 adalah perusahaan dengan kualifikasi tersebut. Berdasarkan data dari GAPENSI, terdapat sebanyak 106 perusahaan yang memenuhi kriteria di atas.

Sampel penelitian, merupakan responden yang diambil dari populasi di atas secara representatif. Dengan melihat jumlah perusahaan yang tersedia, maka jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.

No	Kualifikasi Perusahaan	Jumlah Perusahaan	Jumlah Sampel
1	5	90	74
2	6	13	13
3	7	3	3
	Jumlah	106	90

Tabel 1. Jumlah Sampel Penelitian

2. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini didasarkan pada faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai faktor-faktor penghambat penting yang berpengaruh terhadap penerapan K3. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan K3 pada jasa konstruksi di Propinsi Sulawesi Utara diidentifikasi dan menjadi variabel penelitian, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2. Ketujuh variabel di atas merupakan variabel bebas (X), sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

No	Variabel	Keterangan
1	X1	Perencanaan anggaran proyek
2	X2	Frekuensi sosialisasi K3 dari pemerintah
3	X3	Pengawasan dan sangsi
4	X4	Tingkat kerumitan desain proyek
5	X5	Ketersediaan peralatan K3
6	X6	Budaya pekerja di lapangan
7	X7	Perencanaan strategis dan prioritas perusahaan

Tabel 2. Variabel Penelitian (Sumber: hasil identifikasi dari penelitian terdahulu)

3. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian adalah hasil jawaban kuesioner oleh setiap responden, sedangkan data sekunder juga akan diambil melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Dalam upaya peningkatan implementasi K3 oleh perusahaan secara organisasi, maka responden yang pilih adalah direksi perusahaan atau setidaknya unsur pimpinan atau administrator senior. Nilai jawaban dalam kuesioner, menggunakan nilai pengukuran menurut Skala Likert, yaitu skala pengukuran dengan nilai antara 1 – 5, dimana 1 = kondisi terburuk, 2 = kondisi buruk, 3 = kondisi biasa, 4 = kondisi baik, dan 5 = kondisi terbaik.

4. Teknik Analisis Data

Data primer yang terkumpul kemudian dianalisis menurut prosedur statistika. Untuk melihat pengaruh dari setiap faktor penghambat penting terhadap implementasi K3 digunakan analisis korelasi "Pearson Product Moment". Kedua analisis ini dilakukan dengan bantuan komputer melalui aplikasi SPSS. Berdasarkan hasil analisis korelasi ditambah dengan hasil data sekunder, kemudian dirumuskan upaya-upaya peningkatan implementasi K3 oleh perusahaan jasa konstruksi di Propinsi Sulawesi Utara dari aspek organisasi perusahaan dan aksi kebijakan pemerintah daerah.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi Responden Terhadap Permasalahan

Dari hasil penyebaran 90 kuesioner, 84 berhasil kembali, dan hanya 6 responden tidak mengembalikan

kuesioner. Kuesioner tersebut sebagian besar dijawab/diisi oleh direktur perusahaan jasa konstruksi dan sisanya oleh unsur pimpinan dan staf senior.

2. Hasil Analisis Korelasi

Analisis korelasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara perencanaan anggaran proyek (X1), frekuensi Sosialisasi K3 dari pemerintah (X2), pengawasan dan sangsi (X3), tingkat kerumitan desain proyek (X4), ketersediaan peralatan K3 (X5), budaya pekerja di lapangan (X6), perencanaan strategis dan prioritas perusahaan (X7), masing-masing terhadap penerapan K3 (Y).

Variabel	Koefisien Korelasi (r hitung)
X1	0.532
X3	0.473
X2	0.458
X6	0.425
X7	0.302
X4	0.242
X5	0.223

Tabel 3. Hasil Analisis Korelasi

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa faktor penghambat penting yang paling berpengaruh dalam implementasi K3 di Propinsi Sulawesi Utara adalah faktor perencanaan anggaran (X1), kemudian diikuti oleh pengawasan dan sangsi (X3), frekuensi sosialisasi dari pemerintah (X2), budaya pekerja dilapangan (X6), sedangkan perencanaan strategis dan prioritas perusahaan (X7), tingkat kerumitan desain proyek (X4), dan faktor ketersediaan peralatan K3 (X5) adalah faktor-faktor penghambat yang pengaruhnya lemah dalam penerapan K3.

Upaya peningkatan implementasi keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan jasa konstruksi di Propinsi Sulawesi Utara melalui aksi kebijakan baik pemerintah, peningkatan komitmen perusahaan jasa konstruksi, maupun dari pengguna jasa konstruksi, selanjutnya penguatan koordinasi dan regulasi, serta pemberdayaan dari pihak-pihak yang terkait yang dapat meningkatkan kepedulian akan keselamatan dan kesehatan kerja di lokasi pekerjaan konstruksi. Lebih lanjut Susilawaty (2007) mengatakan bahwa penentuan strategi dan tujuan dari kebijakan publik bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang tepat dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh semua pihak untuk meningkatkan produktifitas kerjanya.

3. Pembahasan

Selama ini, implementasi K3 di Propinsi Sulawesi Utara belum optimal, terlebih pada bidang jasa konstruksi. Hal ini disebabkan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara belum memberi prioritas terhadap

optimalisasi implementasi K3 dalam pembangunan ketenagakerjaan, serta belum mempunyai Perda yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada jasa konstruksi. Bahkan, informasi dari Disnakertrans Propinsi Sulawesi Utara, hingga kini belum ada Perda mengenai K3 untuk sektor manapun. Dinas ini masih menggunakan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan/keputusan menteri tenaga kerja, yang secara umum berlaku di seluruh Indonesia. Untuk itulah perlu dirumuskan kebijakan publik mengenai implementasi K3 di propinsi ini, sebagai bahan masukan dalam pembuatan Perda atau pedoman pelaksanaan K3 pada jasa konstruksi.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengoptimalkan implementasi K3 pada jasa konstruksi di Propinsi Sulawesi Utara, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Anggaran pengadaan alat dan bahan K3 perlu dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) setiap pekerjaan konstruksi, dan disesuaikan dengan nilai fisik pekerjaan, tingkat kerumitan bangunan dan tapak proyek.

2) Sosialisasi K3 perlu dilaksanakan secara berkala oleh pemerintah, dengan bentuk yang bervariasi dan perlunya pengaturan mengenai mekanisme pengawasan agar tercipta kesadaran dalam implementasi K3 di lapangan. Demikian pula pola *reward* dan *punishment* untuk menggalakan kepedulian implementasi K3 baik secara organisasi maupun individu. Termasuk di sini, pemberian kewenangan yang besar pada Bidang yang membidangi K3 pada Disnakertrans Propinsi Sulawesi Utara dalam melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi bagi perusahaan dan pekerja konstruksi apabila tidak mengindahkan peringatan untuk mengimplementasikan K3 pada pekerjaan mereka.

3) Pemerintah sebaiknya mengeluarkan kebijakan publik yang bersifat teknis dengan membentuk unit pengelola alat dan bahan K3, agar supaya pengguna jasa konstruksi, baik pemerintah maupun non pemerintah, dan penyedia jasa konstruksi dapat menyewa dan atau membeli peralatan dan bahan K3. Unit ini dapat bersifat struktural, fungsional, atau badan usaha milik daerah (BUMD).

Keseluruhan upaya-upaya seperti diuraikan sebelumnya, harus dirancang untuk menghasilkan kebijakan publik sejenis Peraturan Daerah mengenai keselamatan dan kesehatan kerja secara umum, dimana pada jasa konstruksi tersirat di dalamnya, atau secara khusus dibuat untuk bidang konstruksi, yang dapat digunakan oleh semua pihak dalam peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja di Propinsi Sulawesi Utara. Disamping Perda, perlu juga disusun pedoman teknis dalam bentuk Peraturan Gubernur Sulawesi Utara.

5. PENELITIAN LEBIH LANJUT

Keinginan untuk melakukan studi peningkatan implementasi K3 oleh perusahaan jasa konstruksi pada unsur pekerja konstruksi yang melakukan pekerjaan fisik, dan upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui cara yang mungkin dalam rangka meningkatkan kebiasaan menggunakan peralatan K3 selama berada di lokasi pekerjaan. Hasil studi tersebut, akan menguntungkan industri konstruksi secara jangka panjang karena perusahaan akan terhindar dari kerugian berupa kehilangan modal dan aset perusahaan lainnya, termasuk pekerja, dan peningkatan standar kinerja yang berpeluang untuk memperoleh penghargaan internasional ISO.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Faktor penghambat penting yang paling berpengaruh adalah: faktor perencanaan anggaran (X1) kemudian diikuti oleh faktor pengawasan dan sangsi (X3), faktor frekuensi sosialisasi dari pemerintah (X2), faktor budaya pekerja dilapangan (X6). Sedangkan faktor perencanaan strategis dan prioritas perusahaan (X7), faktor tingkat kerumitan desain proyek (X4), faktor ketersediaan peralatan K3 (X5) adalah faktor penghambat yang pengaruhnya lemah dalam penerapan K3.

2) Upaya-upaya peningkatan implementasi K3 pada perusahaan jasa konstruksi di Propinsi Sulawesi Utara, adalah:

a) Memasukkan anggaran pengadaan alat dan bahan dalam RAB setiap pekerjaan konstruksi dan disesuaikan dengan nilai fisik pekerjaan, tingkat kerumitan bangunan dan tapak proyek.

b) Sosialisasi K3 perlu dilaksanakan secara berkala dengan bentuk yang bervariasi dan perlunya pengaturan mengenai mekanisme pengawasan untuk meningkatkan kepedulian implementasi K3

c) Pemerintah daerah sebaiknya membentuk unit pengelola alat dan bahan K3, agar supaya penyedia jasa konstruksi dapat menyewa dan atau membeli peralatan dan bahan K3. Unit ini dapat bersifat struktural, fungsional atau badan usaha milik daerah (BUMD).

7. REFERENSI

- Adawiah, R., Mardiyono, M. Irfan Islamy (2010). *Work Protection for Female Labors (A Study on the Implementation of the Policy of Job Safety and Health at the PT. Sarikaya Sega Utama in Banjarbaru, South Kalimantan)*, Tesis, Program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- Basri, Abdullahi Abdullatif (2008). *Simulation Safety Management of IBS Construction*, A project report submitted in partial fulfilment of the

- requirements for the award of the degree of Master of Science (Construction Management), Faculty of Civil Engineering Universiti Teknologi Malaysia.
- BPS (2010). Sulut Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Manado.
- Cheah, C. (2007). *Construction Safety and Health Factors at the Industry Level: The Case Of Singapore*, Journal of Construction in Developing Countries, Vol. 12, No. 2, 2007, p81-99, Universiti Sains Malaysia.
- Ervianto, W. (2002). *Manajemen Proyek Konstruksi*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Fitriana, R. (2010). Usaha Konstruksi Diminta Perhatikan Pekerja, Berita dan Peristiwa Jamsostek, www.jamsostek.co.id/content/news.php?id=1087, diakses: 18-11-10.
- Razuri, C., Luis F. Alarcón and Sven Diethelm (2007). *Evaluating The Effectiveness of Safety Management Practices and Strategies in Construction Projects*, Proceedings IGLC-15, July 2007, Michigan, USA, p271-281.
- Rifandy, A. (2010). Pengelolaan K3 Pada Industri Pertambangan, Forum Bebas Indonesia, www.forumbebas.com/forum-139-page-1.html, diakses: 01-12-10.
- Sudjana, I.P. (2006). Hambatan Dalam Penerapan K3 Dan Ergonomi Di Perusahaan, Makalah, Seminar Ergonomi dan K3 tanggal 29 Juli 2006, Surabaya.
- Susilawaty, S. (2007). *Analisis Kebijakan Publik Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Kota Tasikmalaya*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.